

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, Cet.2, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia; Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*, Cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2015, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet.3, Refika Aditama, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta.

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarti, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Diyanti, Khudzaifah dan Kelik Wardiyanto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta.

Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi, 1995, *Tugas Dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hukum Dan Pembangunan Nomor 6 Tahun XXV*

-----, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1*, Djambatan, Jakarta.

Harahap, M Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanto, J Andy, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Hermoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

- Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook.co,
- Kartini, Soedjendro, J., 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Teori Hukum*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- LJ. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Detarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Machmud, Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Marbun, S.F, 2001, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia Dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2012, *Teori Hukum*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian: Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Moechthar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, University Press, Surabaya.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1989, *Tata Cara Pengangkatan Pejabat Umum*, Intan Pariwara, Jakarta.

Perangin, Effendi, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Projodikoro, R. Wirjono, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Pt. raja Grafindo, Jakarta.

-----, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salman, H.R. Otje dan Anton F. Susanto, 2019, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditma, Bandung.

Simajuntak, P.N.H., 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.3, Kencana, Jakarta.

Soimin, Soedharyoa, 2008, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, sinar grafika, Jakarta.

Subekti, R., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeharto, Irawan, 1990, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknis Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remana Rosda Karya, Bandung.

Soekanto, Soejono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Ter Haar, *Beginnselen en stelsel van het Adatrecht*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*].

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No.20 Tahun 2000, LN No. 130 Tahun 2000, TLN No.2988.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 tentang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya No.34 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Nomor PM 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Jurnal

Assikin, Yovita Christian, dkk, (2019), “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3 No.1 Desember 2019.

Baharudin, 2014, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah”, Jurnal Keadilan Progresif Vol.5 No.1, Bandar Lampung

Elizabeth, Jovita, Teddy Anggoro, “Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.17/Pdt.G/2012/PT TK),” *Pakuan Law Review*, Vol.08, No.01 (2022)

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu dan Hendry Dwicahyo Wanda, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Vol.24 Juli 2017.

Mokoagow, Areini Airin, 2017, “Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960” *Lex Privatum* Vo.5 No.4, Juni 2017.

Pramono, Dedy, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol.12 No.3.

Ramanti, Putu Mas Maya, 2016, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu”, *Acta Comitatus* (2016).

Riska Isnandya, Eva, 2020, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)” *Indonesian Notary* Vol.27.

Sasauw, Cristin, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum* Vol.3. No.1 (Januari-Maret 2015).

Sunanda, Budi, amiruddin A. Wahab, dan Muzakkir Abubakar, 2013, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala Vol.2 No.1 (Agustus 2013).

Sukisno, Djoko, 2008, Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum Vol.20 Nomor 1.

Wardhani, Lidya Christina, 2017, Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, Lex Renaissance No.1 Vol.2 (Januari 2017).

Wahyuningrum, Dian Anggaraini, Siti malikhatun Badriyah, 2024, “Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah” NOTARIUS, Vol.17 No.1 (2024), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

D. Tesis

Adha, Ida, 2017, “Pembatalan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dikaitkan dengan Fungsi dan Tanggung Jawab PPAT”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

Sari, Bakti Farahtika, 2021, “Akibat Hukum Kelalaian PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor

115/PDT/2018/PTMDN)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Sudianto, Jekki, 2018, “Pembatalan Akta Otentik Oleh PPAT Yang dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 455/Pdt/2017/PT.BDG)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

